

## **Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekolah: Kasus di SMKN 1 Bukit Santuai**

**Muhammad Fajrin Alfadilah<sup>1</sup>, Sabarun<sup>2</sup>, Santi Erliana<sup>3</sup>**  
Universitas Islam Negeri Palangka Raya<sup>1,2,3</sup>

Email : [alfadilah.pasca2410130415@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:alfadilah.pasca2410130415@iain-palangkaraya.ac.id), [sabarun@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:sabarun@iain-palangkaraya.ac.id),  
[santi.erliana@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:santi.erliana@iain-palangkaraya.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the management of Regional Assets (BMD) within the school environment, using a case study at SMKN 1 Bukit Santuai. Using a descriptive qualitative approach and data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies, this study found that some stages of asset management, as stipulated in Home Affairs Ministerial Regulation No. 19 of 2016, are not yet optimal. Problems in asset management at SMKN 1 Bukit Santuai include the unscheduled maintenance and care of school assets, the underutilization of school assets, and the disposal and security of assets that lack identification, such as item codes and asset labels. However, some stages of asset management are optimally implemented, such as planning based on actual needs, and digitalized recording and reporting of school assets.*

*Keywords: Regional Assets, Asset Management, SMK*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan sekolah, dengan studi kasus di SMKN 1 Bukit Santuai. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa tahapan pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagian belum berjalan optimal. Permasalahan pengelolaan aset di SMKN 1 Bukit Santuai terdapat di tahapan pemeliharaan dan perawatan aset sekolah yang belum terjadwal rutin, Penggunaan aset sekolah yang kurang di manfaatkan, serta penghapusan dan pengamanan aset yang belum di lengkapi dengan identifikasi seperti kode barang dan label aset. Kendati demikian, terdapat tahapan pengelolaan aset yang berjalan optimal seperti aspek perencanaan yang berbasis kebutuhan aktual, pencatatan dan pelaporan aset sekolah yang sudah dilakukan secara digitalisasi.

Kata kunci: Barang Milik Daerah, Pengelolaan Aset, SMK

## PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset negara yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan. Dalam konteks satuan pendidikan seperti sekolah negeri, BMD meliputi tanah, bangunan, peralatan pembelajaran, laboratorium, komputer, kendaraan operasional, hingga perlengkapan kelas. Aset-aset tersebut seharusnya dikelola dengan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun kenyataannya, pengelolaan BMD di lingkungan sekolah seringkali menemui berbagai kendala administratif, teknis, dan sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap efektivitas operasional pendidikan.

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan BMD di sekolah adalah lemahnya pencatatan dan pendataan aset. Masih banyak sekolah yang belum menerapkan sistem inventarisasi berbasis digital, sehingga proses pelaporan aset dilakukan secara manual, rawan kesalahan, dan sulit diperbarui secara berkala. Ketidakesesuaian antara barang yang tercatat dengan kondisi fisik di lapangan seringkali ditemukan, mulai dari barang yang rusak namun masih tercantum sebagai aktif, hingga barang yang hilang namun tidak segera dilaporkan atau dihapuskan sesuai prosedur. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di sekolah dalam memahami regulasi pengelolaan BMD seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Selain itu, proses pengadaan dan perencanaan kebutuhan barang kerap tidak berdasarkan analisis kebutuhan riil dari tiap jurusan atau unit kerja. Hal ini menyebabkan adanya aset yang kurang dimanfaatkan atau mubazir karena tidak sesuai dengan spesifikasi kegiatan pembelajaran yang ada. Di sisi lain, terdapat pula kebutuhan barang yang sangat penting namun tidak tersedia akibat kurangnya alokasi anggaran atau ketidaktepatan prioritas dalam pengadaan. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan lemahnya sistem perencanaan berbasis kebutuhan yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam manajemen aset sekolah.

Dalam aspek pemanfaatan dan pemeliharaan, banyak sekolah masih bersifat reaktif, yaitu hanya memperbaiki aset ketika sudah rusak parah, tanpa adanya jadwal pemeliharaan rutin. Kurangnya anggaran pemeliharaan dan tidak adanya tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik barang menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pemanfaatan aset. Akibatnya, banyak aset yang cepat mengalami penurunan fungsi dan usia pakai, padahal biaya pengadaannya cukup besar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah penghapusan aset dan pelaporan aset yang belum sepenuhnya mengikuti prosedur. Proses penghapusan seringkali terlambat karena keterbatasan pemahaman teknis, atau bahkan karena rasa enggan pihak sekolah untuk melaporkan aset rusak atau hilang. Di beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan potensi temuan dalam audit keuangan atau pemeriksaan inspektorat. Begitu pula dalam pelaporan aset, masih banyak sekolah yang belum mampu menyampaikan laporan sesuai dengan format dan waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah, sehingga menghambat proses pengambilan kebijakan berbasis data aset.

SMKN 1 Bukit Santuai sebagai salah satu sekolah kejuruan negeri di Kabupaten Kotawaringin Timur tentu memiliki peran strategis dalam penyediaan pendidikan vokasional bagi generasi muda. Sekolah ini memiliki berbagai jenis aset yang digunakan untuk praktik kejuruan, administrasi, dan operasional sekolah. Namun, sekolah juga menghadapi tantangan yang umum ditemukan pada satuan pendidikan lainnya dalam hal pengelolaan BMD, baik dari sisi teknis pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pelaporan.

Dengan latar belakang tersebut, sangat penting untuk mengkaji bagaimana manajemen BMD dilaksanakan di SMKN 1 Bukit Santuai serta strategi optimalisasi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset di sekolah tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya pengelolaan inventaris atau Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan sekolah, terutama dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Penelitian oleh Pramono (2021) di SMK Negeri 10 Malang mengembangkan sistem informasi manajemen inventaris berbasis web untuk menggantikan pencatatan manual yang selama ini rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Sistem ini dinilai layak digunakan berdasarkan uji kelayakan System Usability Scale (SUS) dengan skor 75,25.

Selanjutnya, Situmorang dan Ritonga (2020) merancang sistem inventaris berbasis Visual Basic.Net di SMK Negeri 7 Medan yang terbukti mempermudah proses pendataan, pelaporan, serta pengawasan barang.

Dalam studi serupa, Gunawan (2020) di SMK Perguruan Cikini menerapkan metode prototipe dalam pengembangan aplikasi inventaris, yang terbukti mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset sekolah.

Di sisi lain, Barus dan Sembiring (2021) meneliti sistem inventarisasi di SMK Swasta Pabaku Stabat dan menunjukkan bahwa sistem berbasis database MySQL mampu mengurangi risiko kehilangan data serta mempercepat pelaporan kepada pihak manajemen sekolah.

Sementara itu, penelitian oleh Rahmawati (2022) di SMK Negeri 1 Tarusan lebih menyoroti persepsi guru terhadap pengelolaan sarana dan prasarana, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan pengguna akhir (end user) sangat berpengaruh terhadap akurasi dan keberlanjutan pencatatan BMD. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan BMD yang terstruktur, berbasis teknologi, dan melibatkan semua unsur sekolah sangat penting untuk mendukung tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menyajikan gambaran komprehensif terkait kondisi aktual pengelolaan BMD di SMKN 1 Bukit Santuai, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi sekolah lain, khususnya dalam membangun sistem pengelolaan aset yang akuntabel, tertib administrasi, dan mampu memberikan nilai tambah terhadap mutu layanan pendidikan. Optimalisasi pengelolaan BMD bukan hanya sebatas kepatuhan administratif, tetapi menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola sekolah yang modern dan transparan di era digital saat ini.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Barang Milik Daerah (BMD)

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, BMD meliputi barang berwujud dan tidak berwujud yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah, termasuk satuan pendidikan negeri. Ruang lingkup BMD di sekolah meliputi lahan dan bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, bengkel praktik, peralatan dan perlengkapan, kendaraan dinas, komputer, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya. Pengelolaan

BMD mencakup seluruh siklus hidup aset, dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan.

## 2. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan BMD

Tujuan utama pengelolaan BMD adalah menjamin penggunaan aset secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan. Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan aset publik yang baik dapat mencegah pemborosan anggaran dan memastikan aset digunakan sesuai kebutuhan riil organisasi. Prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pengelolaan BMD antara lain tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks sekolah, prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar setiap barang yang diterima maupun digunakan benar-benar mendukung tujuan pendidikan.

## 3. Siklus Manajemen Aset di Sekolah

Manajemen aset di sekolah mengikuti siklus pengelolaan barang daerah yang telah diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016, meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, yaitu penyusunan kebutuhan barang yang dirinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- b. Pengadaan, yakni proses memperoleh barang dari dana BOS, DAK, atau APBD.
- c. Penerimaan dan Pencatatan, barang yang masuk harus dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan diberi label atau kode aset.
- d. Penggunaan dan Pemanfaatan, yang mencakup bagaimana aset digunakan untuk proses pembelajaran dan administrasi.
- e. Pemeliharaan, berupa perawatan rutin maupun insidental.
- f. Penghapusan, dilakukan jika barang rusak total, hilang, atau tidak dapat dimanfaatkan.
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, yaitu penyusunan laporan aset berkala untuk instansi terkait.

Tahapan-tahapan ini seharusnya dikelola oleh bendahara barang atau petugas inventarisasi yang kompeten agar sistem berjalan tertib.

## 4. Tantangan Umum dalam Pengelolaan Aset Sekolah

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa pengelolaan aset sekolah masih menghadapi kendala serius. Menurut Suwanda (2020), tantangan umum meliputi:

- (1) kurangnya pemahaman terhadap regulasi
- (2) pencatatan manual yang rawan kesalahan
- (3) keterbatasan kapasitas SDM pengelola aset
- (4) tidak adanya SOP internal sekolah, dan
- (5) lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan.

Ketiadaan sistem informasi berbasis digital menyebabkan proses pelaporan menjadi lamban dan tidak real-time. Seringkali ditemukan aset yang tidak tercatat, atau tercatat tetapi tidak sesuai kondisi lapangan. Selain itu, beberapa sekolah juga menghadapi kendala dalam pemeliharaan karena keterbatasan anggaran dan tidak adanya jadwal pemeliharaan berkala.

## 5. Peran Teknologi dalam Pengelolaan Aset Sekolah

Dalam era digitalisasi, pemanfaatan sistem informasi manajemen aset menjadi sangat penting. Teknologi informasi memungkinkan sekolah untuk mencatat, memantau, dan melaporkan aset secara sistematis dan cepat. Aplikasi seperti SIMDA Barang, E-Sarpras, dan sistem inventaris lokal berbasis Microsoft Excel atau Access menjadi alternatif dalam menyusun data aset yang akurat. Menurut Herlina (2021), penggunaan aplikasi inventarisasi barang membantu sekolah menghindari kehilangan data, mempermudah audit, dan meningkatkan transparansi. Di samping itu, teknologi juga memudahkan kepala sekolah dan pengelola barang dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data real-time.

## 6. Kebijakan dan Regulasi Terkait BMD di Satuan Pendidikan

Pengelolaan BMD di satuan pendidikan mengacu pada beberapa kebijakan penting, di antaranya:

- a. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
  - b. Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Sekolah Penggerak yang mendorong tata kelola sekolah yang akuntabel,
  - c. Peraturan Menteri Keuangan terkait akuntansi aset tetap di lingkungan pemerintahan,
  - d. dan regulasi pemerintah daerah yang spesifik mengatur pelaporan aset sekolah.
- Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi sekolah dalam menyusun SOP pengelolaan barang, mulai dari pengadaan hingga penghapusan.

## 7. Implikasi Manajemen Aset terhadap Mutu Pendidikan

Pengelolaan aset yang optimal berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan. Aset yang lengkap, terawat, dan tepat guna mendukung kenyamanan proses belajar, efektivitas kegiatan praktikum, serta efisiensi operasional sekolah. Sebaliknya, manajemen aset yang buruk dapat menghambat pembelajaran, menimbulkan kerugian negara, serta menurunkan citra tata kelola sekolah. Menurut Nasution (2022), sekolah yang menerapkan manajemen aset berbasis data menunjukkan performa pembelajaran yang lebih konsisten karena fasilitas tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

## 8. Optimalisasi Manajemen Aset: Pendekatan Strategis

Optimalisasi pengelolaan aset tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga memerlukan komitmen kepemimpinan sekolah, penguatan budaya organisasi, dan pembenahan sistem kerja. Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2019), pendekatan optimalisasi dapat dilakukan melalui lima langkah: (1) penilaian kondisi awal aset, (2) pengembangan sistem inventaris digital, (3) pelatihan pengelola aset, (4) pengawasan berkala, dan (5) evaluasi serta pelaporan berbasis indikator kinerja. Strategi ini harus dijalankan secara sinergis agar pengelolaan aset menjadi bagian dari manajemen sekolah yang integral dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di SMKN 1 Bukit Santuai. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual, permasalahan, serta peluang

optimalisasi pengelolaan aset di lingkungan sekolah. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam praktik manajemen BMD dalam konteks yang spesifik dan nyata.

Lokasi penelitian adalah SMKN 1 Bukit Santuai, yang dipilih secara purposif karena merupakan sekolah kejuruan negeri yang memiliki beragam aset strategis untuk mendukung kegiatan belajar praktik. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2025.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kondisi aset sekolah, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, bendahara barang, staf tata usaha, dan guru, serta studi dokumentasi atas data inventaris, laporan aset, dan dokumen terkait lainnya. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam pengelolaan BMD.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta verifikasi langsung kepada informan utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dan studi dokumentasi terhadap praktik pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di SMKN 1 Bukit Santuai. Pembahasan disusun berdasarkan tahapan pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan penggunaan, pemeliharaan, serta penghapusan dan pelaporan. Berikut ini uraian hasil temuan dan pembahasannya:

### 1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), perencanaan aset yang efektif harus memperhitungkan kondisi eksisting, usia barang, dan tingkat urgensi penggunaannya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan barang di SMKN 1 Bukit Santuai dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Pena Berkah, dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan tersebut sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan riil yang disepakati lewat rapat sekolah dan semua kebutuhan tersebut masuk dalam usulan pengadaan.

### 2. Pengadaan Barang dan Prosedur Administratif

Menurut Suwanda (2020), pengadaan aset seharusnya melibatkan tim teknis dari sekolah yang memahami kebutuhan pengguna, bukan hanya panitia pengadaan.

Pengadaan barang umumnya dilakukan melalui dana BOSP dan permintaan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Prosedur pengadaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun pelaksanaannya sering menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi barang dari penyedia karena akses perjalanan ke sekolah yang jauh.

### 3. Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Menurut teori manajemen aset oleh Indrajit dan Djokopranoto (2019), pemanfaatan aset harus dikaitkan dengan indikator efektivitas penggunaan barang, sehingga setiap aset dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan nilai belinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, masih ditemukan aset yang kurang dimanfaatkan dan dioptimalkan. Seperti tanah, bangunan, komputer, genset, dan barang yang memberikan manfaat yang belum di optimalkan.

#### **4. Pemeliharaan dan Perawatan Aset Sekolah**

Menurut Herlina (2021), pemeliharaan aset merupakan bagian penting dari siklus hidup barang yang jika diabaikan akan menurunkan umur pakai dan nilai manfaat barang secara drastis.

Pemeliharaan barang milik daerah di SMKN 1 Bukit Santuai dilakukan secara terbatas dan bersifat insidental. Tidak ada jadwal pemeliharaan rutin yang terdokumentasi secara formal. Pemeliharaan biasanya hanya dilakukan ketika barang mengalami kerusakan, dan itu pun sangat tergantung pada ketersediaan anggaran BOSP.

#### **5. Penghapusan dan Pengamanan Aset**

Terkait penghapusan barang, sekolah masih menghadapi kendala prosedural dan administratif. Ada aset yang sudah tidak layak pakai namun belum diajukan untuk dihapuskan, sehingga tetap tercatat dalam dokumen inventaris.

Dari sisi pengamanan, sebagian barang berharga belum dilengkapi dengan identifikasi seperti kode barang atau label aset. Selain itu, tidak ada CCTV atau sistem keamanan terpadu di lingkungan sekolah untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan barang. Padahal, pengamanan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan aset milik daerah. Ketidaklengkapan identitas barang juga menyulitkan saat audit atau pemeriksaan internal.

#### **6. Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah**

Menurut teori manajemen aset publik, sistem pelaporan yang baik harus bersifat real-time, transparan, dan berbasis digital (Mardiasmo, 2018). Tanpa digitalisasi, sekolah kesulitan memantau status aset secara cepat dan akurat.

Pelaporan BMD di SMKN 1 Bukit Santuai dilakukan melalui website Pena Berkah dan Peduli BMD berkala kepada dinas pendidikan. Aplikasi sistem informasi manajemen aset yang dapat mempermudah pencatatan dan pelaporan secara digital.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di SMKN 1 Bukit Santuai masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu di optimalisasi, mulai dari penggunaan, pemeliharaan, hingga pelaporan dan penghapusan.

Dalam hal pemanfaatan, sebagian besar barang telah digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, tetapi masih ditemukan aset yang tidak termanfaatkan karena rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Pemeliharaan dilakukan secara reaktif dan tidak terjadwal, sehingga banyak aset mengalami

kerusakan sebelum waktunya. Penghapusan barang berjalan lambat karena prosedur administratif yang kompleks.

Meskipun demikian, terdapat tahapan pengelolaan aset Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pihak sekolah menunjukkan untuk merencanakan kebutuhan barang berdasarkan analisis kebutuhan aktual melalui forum rapat kepala sekolah dan dewan guru. Serta pencatatan dan pelaporan aset sudah berbasis digitalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2019). *Manajemen Aset dan Aset Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Suwanda, D. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sektor Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlina, N. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Aset Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2022). *Manajemen Pendidikan dan Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Sekolah*. Jakarta: Kencana.